

## ABSTRAK

Polemik kebijakan *Presidential Theshold* menyebabkan konflik di masyarakat yang membuat politik Indonesia mengalami kemunduran. Demokrasi yang seharusnya memberikan kebebasan malah dijadikan penjara untuk rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan *Presidential Threshold* terhadap identitas politik antara dua kelompok (cebong-kampret). Serta mengkaji persoalan mengenai dampak, sejarah dan upaya mengenai kebijakan *Presidential Threshold*. Dampak yang terjadi mengakibatkan polarisasi warganet dan pola komunikasi yang memanas dan tidak terkontrol di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode netnografi dengan pendekatan wacana kritis. Penelitian ini memfokuskan kajian studi di media sosial dan memahami hubungan sosial pada media sosial. Penelitian ini melakukan analisis media sosial dan mengamati fenomena mengenai masalah yang ingin diteliti serta melakukan pengumpulan data menggunakan media sosial. Hasil penelitian ini dengan kebijakan presidential threshold berdampak adanya inkonsistensi partai politik, hanya terdapat 2 pasangan calon, kehilangan partai kecil karena adanya upaya oligarki dan memunculkan identitas politik cebong-kampret. Selanjutnya perkembangan *presidential threshold* 2004-2019 mengalami beberapa pergantian Undang-Undang. Dan apabila Kebijakan Presidential Threshold tahun 2024 dilaksanakan maka sejarah akan terulang kembali dengan beberapa permasalahan yang akan muncul. Dengan mengurangi angka ambang batas dan penghapusan presidential threshold memberikan beberapa keuntungan yaitu memulihkan hak-hak konstitusional, memberikan warga negara dengan beberapa pilihan, mengurangi intensitas elektoral sosial, mengurangi jumlah golongan putih (golput), dan efisiensi waktu.

**Kata Kunci :** Kebijakan, *Presidensial Threshold*, Identitas Politik